



Bansos

Belii Mesin Pengolah Sampah

Bupati akan Pangkas

Semarapura (Bali Post) -

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta betul-betul serius menyikapi persoalan sampah di TPA Sente, Desa Pikat, Dawan. Setelah mendapat surat dari Desa Pakraman Pikat, Bupati bakal membalas surat tersebut dan menindaklanjutinya dengan melakukan pertemuan dengan warga setempat.

Untuk menanggulangi sampah di TPA Sente, Bupati asal Nusa Penida itu juga memastikan akan membeli dua unit mesin *incenerator* (pengolah sampah) pada 2016. Menariknya, untuk membeli mesin seharga Rp 2,2 miliar per unit ini, Bupati tidak ada mengorbankan program-program yang akan dijalankan tahun depan. Sebaliknya, ia berencana memangkas dana bansos dan hibah.

"Yang pasti tidak ada pro-

gram yang dipangkas. Semua program tetap dijalankan, hanya nanti dilakukan secara bertahap dan nanti kami akan kurangi dana bansos dan hibah," ujar Suwirta ketika dikonfirmasi, Kamis (27/8) kemarin.

Pemkab sendiri telah membalas surat yang dikirim Desa Pakraman Pikat untuk menutup TPA Sente. Pemkab berencana menutup TPA Sente. Hanya, sebelum dilakukan penutupan, Bupati meminta

mengakui tidak bisa dengan dua mesin *incenerator*. Sebab, satu mesin *incenerator* hanya bisa mengolah sampah 48 meter kubik per hari. Jadi, sisa sampah di Kecamatan Dawan akan tetap dikirim ke TPA Sente.

"Intinya, kami di pemkab tidak ada maksud melakukan pembiaran terkait masalah sampah di TPA Sente. Petugas di sana juga kami minta agar menghindari kesalahan serta bersinggungan dengan warga dan tokoh masyarakat setempat. Apalagi sampah di TPA akan dijadikan pupuk," ungkap Suwirta seraya menambahkan telah melakukan pengobatan gratis bagi warga Sente. (kmb)

waktu untuk melakukan pertemuan dengan warga guna menyampaikan langkah-langkah yang diambil pemkab

dalam menangani sampah di TPA Sente, baik jangka pendek dengan mengatasi polusi di TPA maupun jangka panjang dengan membeli mesin *incenerator*.

Untuk pengadaan mesin *incenerator*, Bupati telah menyiapkan dua lokasi untuk tempat penampungan sementara (TPS), yakni di Gelgel dan Leping, Takmung, persisnya di tempat pembuangan tinja. Di Gelgel tersedia lahan 12 are milik provinsi yang dipakai tempat pengolahan sampah. Pengolahan sampah di Gelgel malah diminta langsung oleh perbekel setempat.

Terkait penanganan sampah di Klungkung yang mencapai 210 meter kubik per hari, Bupati Suwirta



Bali Post/kmb

I Nyoman Suwirta

Edisi : Jumat, 28 Agustus 2015

Hal : 10



Kasus GOR Nusa Penida Komnas PAN Minta Tersangka Diungkap

Semarang (Bali Post) -

Hingga saat ini dua tersangka kasus GOR Nusa Penida yang dibidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung belum jelas. Kondisi ini dipertanyakan masyarakat, mengingat tersangkanya yang merupakan pejabat di tubuh Pemkab Klungkung, mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan kasus lainnya yang sebelumnya ditangani Kejari.

Ketua Komnas PAN Klungkung Made Raka Adnyana mempertanyakan ketidakjelasan kasus GOR Nusa Penida. Menurutnya, GOR Nusa Penida yang dibangun 2009 harus diusut secara gamblang karena menghabiskan anggaran hingga Rp 2,2 miliar. Bila kasusnya sudah masuk ke tahapan penyidikan, tersangka yang telah ditetapkan seharusnya diberikan. "Saya selaku masyarakat meminta kalau memang sudah terbukti sebagai tersangka, agar diungkap," tuturnya saat dikonfirmasi, Kamis (27/8) kemarin.

Pihaknya meminta tidak ada tebang pilih dalam pengusutan kasus yang kini ditangani Kejari Klungkung. Jangan sampai tersangka yang telah terbukti melakukan tindakan korupsi malah mendapatkan perlakuan khusus. Apalagi sampai mengamankan identitas tersangka dari publik. "Siapa pun kalau memang terbukti agar diungkapkan ke masyarakat," imbuhnya.

Sebelumnya, Kejari Klungkung berencana mendatangkan tim teknis bantuan dari KPK RI dalam mengungkap kasus GOR Nusa Penida. KPK sudah menunjuk perguruan tinggi yang akan diambil sebagai tim ahli. Ada sekitar 20 orang ahli akan melakukan penghitungan dengan menggunakan peralatan yang diangkut dengan dua truk.

Akan tetapi pascapergantian dua punggawa Kejari Klung-

kung, yakni Kepala Kejari (Kajari) Totok Bambang Supto Dwidjo dan Kasi Intel Suhadi, kasus GOR Nusa Penida menjadi tidak jelas. Kacabjari Nusa Penida Dewa Made Mertayasa saat dihubungi via telepon tidak mau meng angkatnya.

Kejari Klungkung mulai melakukan penyelidikan kasus GOR Nusa Penida pada awal 2015. Penyelidikan ini dilakukan sampai ke tingkat penyidikan Juni lalu. Saat melakukan gelar perkara Juli lalu, pihak penyidik akhirnya menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut dengan memegang dua alat bukti. Kajari belum mau membeberkan, melainkan hanya mengatakan ada indikasi kerugian negara sekitar Rp 1,5 miliar dalam pembangunan GOR. Tersangka tidak ditahan dan tidak diungkapkan identitasnya. Pihak Kejari beralih keduanya masih berstatus PNS aktif, sehingga masih diberikan kesempatan menjalankan tugasnya sebagai pegawai.

GOR Nusa Penida berlokasi di Dusun Sampalan, Desa Batununggul. Pembangunannya menggunakan dana pusat, Pemprov Bali, dan APBD Klungkung. Pemkab Klungkung diketahui menggelontorkan dana sekitar Rp 500 juta untuk melanjutkan pembangunan yang dikerjakan secara swakelola. Sayangnya, pelaksanaan pembangunan GOR tidak berjalan tuntas sehingga mangkrak sampai sekarang. (dwa)



Silpa 2014 Tembus Rp 128 Miliar

Eksekutif Dituding

Kurang Cermat

Buat Program

Bangli (Bali Post) -

Kalangan DPRD Bangli mengkritisi tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2014. Dewan menilai tingginya silpa yang menembus angka Rp 128 miliar tersebut merupakan bentuk dari kurang cermatnya eksekutif dalam membuat program.

Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata. Saat ditemui Kamis (27/8) kemarin, dia mengungkapkan bahwa silpa tahun 2014 yang mencapai Rp 128 miliar berasal dari berbagai sumber. Salah satunya dari Sekretariat Daerah (Setda), yang menjadi penyumbang silpa terbesar Rp 40 miliar. "Setda jadi penyumbang terbesar. Jumlah tersebut sudah termasuk pos anggaran alokasi dana desa (ADD) yang tidak berhasil dipergunakan, hibah dan bantuan sosial (bansos),"

terangnya.

Menurut Kutha Parwata, banyak faktor yang menyebabkan banyaknya silpa di tahun 2014. Salah satu yang utama adalah akibat rasa ketakutan eksekutif dalam menjalankan programnya karena adanya perubahan aturan. Di samping itu, dia menyebutkan besarnya silpa juga disebabkan karena kekurangcermatan SKPD dalam menyusun program.

Di sisi lain, banyaknya silpa tahun lalu juga diakuinya diakibatkan karena adanya sejumlah program SKPD yang awalnya

dirancang didanai APBD namun kemudian mendapatkan dana pusat. Sehingga dana tersebut mengendap dan menjadi silpa. "Salah satu contohnya, kita ingin bangun gapura dan mendapat dana pusat. Tetapi ternyata tanah yang akan dibangun bermasalah. Karena dana dari pusat ini sudah masuk ke APBD sehingga jadinya diam dan kemudian mengendap jadi silpa," terangnya.

Penyebab lain banyaknya silpa karena adanya penghematan di beberapa program termasuk ada beberapa kegiatan yang tidak

bisa dibayarkan. "Misalnya dana sertifikasi yang banyak tidak terbayarkan. Selain itu penghematan juga dari sisi tender kegiatan," jelasnya.

Atas banyaknya silpa tersebut, ia mengaku cukup prihatin. Pasalnya di balik silpa yang mencapai Rp 128 miliar tersebut masih banyak program yang tidak bisa didanai.

Terkait hal itu, ke depan pihaknya berharap SKPD bisa menyusun program prioritas sehingga pendanaannya bakal diutamakan. "Kita akan efektifkan komunikasi antara dewan dan eksekutif. Kalau komunikasi sudah berjalan baik tentu ini tidak akan sulit," tandasnya. (kmb40)



Bali Post/dok
Ngakan Kutha Parwata

Edisi : Jumat, 28 Agustus 2015

Hal : 8